

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LITERASI KEUANGAN PADA USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS**

**Christian Herdinata**

Program Studi International Business Management Univeristas Ciputra Surabaya

Email: [christian.herdinata@ciputra.ac.id](mailto:christian.herdinata@ciputra.ac.id)

**Abstrak :** *Konsep literasi keuangan sangat penting bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini akan memudahkan dalam mengetahui bagaimana cara memperoleh dana dan bagaimana mengelola dana yang diperoleh. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur dengan menggali secara kritis tentang pengetahuan, gagasan, atau temuan didalam literatur. Implementasi kebijakan literasi keuangan perlu memandukan desain organisasi dan kegiatan perencanaan, menyoroti kebutuhan dan nilai modal manusia, serta kemampuan UMKM dan waktu diperlukan untuk pengembangan yang dikaitkan dengan kebijakan dan peraturan. Hal yang dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan literasi keuangan yaitu dengan model collaborative governance yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan monitoring kebijakan bagi UMKM dalam penerapan literasi keuangan.*

**Kata kunci:** *literasi keuangan, collaborative governance, UMKM*

**Abstract :** *The concept of financial literacy is very important for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This will make it easier to know how to obtain funds and how to manage the funds obtained. The method used in this research is a literature study by critically exploring knowledge, ideas, or findings in the literature. Implementation of financial literacy policies needs to guide organizational design and planning activities, highlighting the need and value of human capital, as well as MSME capabilities and the time required for development linked to policies and regulations. Things that can be applied in the implementation of financial literacy policies are collaborative governance models that can be applied in order to monitor policies for MSMEs in implementing financial literacy.*

**Keywords:** *financial literacy, collaborative governance, micro, small and medium enterprises*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Wolf (2007) globalisasi diartikan sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan, daya inovasi, dan teknologi yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi serta hasil dari perubahan dasar finansial, manajemen perusahaan dan tata pemerintahan modern yang semakin terbuka dan demikratis. Globalisasi secara umum telah membawa manfaat besar bagi umat manusia dalam memicu pertumbuhan ekonomi, mengubah struktur produksi menjadi lebih efisien, dan mengangkat taraf hidup masyarakat. Dengan adanya globalisasi, hambatan teknis maupun kultural yang selama ini dilakukan oleh masing-masing negara itu sendiri harus ditekan dan diminimalisir serendah mungkin (Budiarto, 2016).

Problematika UMKM harus segera diatasi agar secara berkelanjutan perkembangan UMKM dapat memberikan topangan bagi perekonomian negara. Untuk itu, kita perlu memetakan bagaimana problematika UMKM secara umum untuk dicarikan solusi terbaik agar lebih berkembang. Pengelolaan keuangan sudah semestinya menjadi perhatian khusus bagi seseorang untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Bahkan dalam hal ini untuk konteks perusahaan pun, keuangan menjadi dalam satu sektor krusial bagi perusahaan. Hal ini kemudian dikenal dengan perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah sikap dan tingkah laku seseorang dalam mengelola keuangannya yang ditandai dengan adanya tindakan konsumsi juga menabung (Hira & Mugenda, 1999).

Memahami konsep literasi keuangan ini menjadi sangat penting. Hal ini akan memudahkan mereka mengetahui bagaimana sebuah nilai uang itu akan bermanfaat di masa kini dan seberapa besar pengaruhnya di masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis UMKM untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan mereka (Aribawa, 2016). Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar (Aribawa, 2016). Menurut Rohrke & Robinson (2000), literasi keuangan adalah cara terbaik untuk mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan lembaga keuangan diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif. Hailwood (2007) menguatkan bahwa *financial literacy* akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan. Kecakapan finansial ini menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan untuk menerapkan secara tepat.

Literasi keuangan dibagi menjadi empat aspek yang terdiri dari pengetahuan keuangan dasar (*basic financial knowledge*), simpanan dan pinjaman (*saving and borrowing*), proteksi (*insurance*), dan investasi (Chen dan Volpe, 1998). Dengan demikian rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi (Yushita, 2017). Strategi Nasional Literasi keuangan mencanangkan tiga pilar utama yaitu (OJK, 2013): Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan; Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan; Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

Semua orang telah mendengar tentang pentingnya keamanan data mengingat bahwa kemajuan teknologi telah menyebabkan meningkatnya serangan *cyber* dan peretasan. Perusahaan harus siap untuk menanggapi serangan seperti ini secara instan, kapan saja, untuk menghindari litigasi, penuntutan, dan kerusakan reputasi. Meskipun ini adalah ancaman nyata bagi dunia komersial, artikel ini akan fokus pada teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mendukung sektor keuangan dan hukum dalam kinerja layanan. Regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, keamanan data dan tampilan desain pengguna inilah yang mempengaruhi penerapan FinTech (Stewart dan Jurjens, 2018). Serman *et al*, dalam Teja (2017) menyatakan bahwa strategi penerapan Fintech yang tujuannya untuk mencapai pertumbuhan yang cepat, dapat menciptakan risiko kelebihan kapasitas industri. Dengan demikian perusahaan perlu mengatasi masalah tersebut dengan menjadi pemimpin dalam sebuah ekosistem bisnis melalui kolaborasi. Dengan mengikat sebuah jaringan pengguna dan mengubah peran pengguna menjadi pengembang maka asumsinya perusahaan

akan mendapatkan lebih banyak penerimaan (Lu *et al*, 2014). Transformasi pengguna menjadi pengembang-pengguna dapat membuka peluang baru (Overholm, 2014; McKelvey *et al*, 2015). Prospek penerapannya akan tumbuh lebih cepat dari pada pesaing ketika menggunakan kolaborasi antara industri dan ekosistem bisnis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan dari buku, dokumen, dan jurnal ilmiah. Selanjutnya berdasarkan kajian literatur tersebut dilakukan peninjauan secara kritis tentang pengetahuan, gagasan, atau temuan didalam literatur yang berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk topik tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Chema dalam Keban (2008:38), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5). Sementara Ulum dan Ngindana (2017:6) menyebutkan bahwa *governance* mengindikasikan ‘disesiminasi otoritas’ dari *single actor* menjadi *multi-actor*. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik. Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan oleh Ansell dan Grash (2007) bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. (4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. (6) Mobilisasi kelompok kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *governance* dapat dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan implementasi literasi keuangan bagi UMKM.

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansell dan Grash (2007:558-561) sebagai berikut: a) *Face to face dialogue*, semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog

secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang biasa. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar *stakeholder* yang terlibat, sehingga, *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama. b) *Trust building*, buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. c) *Commitment to process*, komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah risiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan. d) *Share Understanding*, pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. e) *Intermediate outcomes*, hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Hal yang dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan literasi keuangan yaitu dengan model *collaborative governance* yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan monitoring kebijakan bagi UMKM dalam penerapan literasi keuangan.

Literasi keuangan berkaitan erat dengan keterampilan dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, identifikasi dan pengembangan keterampilan untuk mengelola bisnis perlu dilakukan oleh UMKM. Menurut Sousa dan Rocha (2019) keterampilan yang diperlukan yaitu inovasi, kepemimpinan dan manajemen dengan penjelasan sebagai berikut: (1) keterampilan inovasi yang dibutuhkan oleh manajer: kapasitas untuk berinovasi dan kreativitas, kapasitas untuk diversifikasi area bisnis, kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi bisnis baru peluang, keterampilan manajemen proyek untuk menghubungkan tujuan proyek dengan konteks bisnis, kapasitas dan kemauan untuk mengambil risiko, kapasitas untuk mengatur sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi peluang, kapasitas untuk menciptakan dan mengembangkan jaringan nasional dan internasional; (2) keterampilan kepemimpinan: kinerja karyawan, peluang pengembangan, motivasi karyawan, kepuasan karyawan, komunikasi, mengelola harapan, mengintegrasikan perbedaan budaya; (3) keterampilan manajemen yaitu bentuk dan model baru organisasi kerja, teknologi baru,

perubahan organisasi, inisiatif, pengambilan keputusan, kapasitas untuk mengelola kesepakatan dan aliansi strategis, analisis Informasi, kompetensi sosial dan relasional. Maka dari itu, dengan adanya keterampilan dalam inovasi, kepemimpinan dan manajemen akan mendukung implementasi kebijakan literasi keuangan bagi UMKM.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hal yang perlu dibangun dalam kebijakan terkait literasi keuangan bagi UMKM yaitu tentang *strategic role* yang membantu dalam memahami peran setiap pihak dengan benar dan tepat sehingga dapat mendukung usaha yang spesifik dan yang bergerak secara dinamis. Disisi lain, UMKM perlu memiliki *strategic planning capability* yang mendukung dalam pencapaian untuk beradaptasi dengan perkembangan literasi keuangan berbasis *financial technology*.

### **Saran**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus lincah dalam menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi (*organizational agility*) sehingga dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal dengan memaksimalkan implementasi kebijakan literasi keuangan dan mampu mencapai nilai optimal yang berkelanjutan (*sustained value*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chen, H & Volpe, RP. 1998. "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students." *Financial Services Review*, 7(2), 107-128.
- Hailwood, DWAK 2007, 'Financial Literacy and its Role in Promoting a Sound Financial System', *Reserve Bank of New Zealand*, Vol 70, No. 2.
- Lu, C., Rong, K., You, J., & Shi, Y. (2014). Business ecosystem and stakeholders' role transformation: evidence from chinese emerging electric vehicle industry. *Expert Systems with Applications*, 41, 4579- 4595..
- McKelvey, M., Zaring, O., & Ljungberg, D. (2015). Creating innovative opportunities through research collaboration: an evolutionary framework and empirical illustration in engineering. *Technovation*, 39-40, 26-36.
- Overholm, H. (2014). Collectively created opportunities in emerging ecosystems: the case of solar service ventures. *Technovation*, 39-40, 14-25.
- Rohrke, A, & Robinson, L 2000, 'Guide to Financial Literacy Resources', *Journal of Financial Literacy*.
- Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Skills for disruptive digital business. *Journal of Business Research*, 94, 257-263.
- Stewart, Harrison,. Jan Jurjens. (2018). Data Security and Consumer trust in Fintech Innovation in Germany.
- Teja, Adrian. (2017). Indonesian Fintech Business: New Innovations or Foster and Collaborate in Business Ecosystems?. *The Asian Journal of Technology Management*. Vol. 10 No. 1 pp 10-18
- Wolf, Martin (2007). *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*. JAKARTA : Yayasan Obor Indonesia.
- Yushita, A.N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Pribadi. *Jurnal Nominal*. Vol VI No 1 pp 11-26